

Pernyataan sebagai pengganti sertifikasi (sertifikasi diri) Mod. MI-IMM-AUT-01

Berdasarkan D.P.R. n. 445 dari 28.12.2000 A _____
Saya, yang bertanda tangan di bawah ini (nama dan nama keluarga)

lahir _____ Prov. _____ Negara _____

_____ berdomisili di _____ Prov. _____

Di Via/Piazza _____ N.

mengetahui sanksi pidana dalam hal pernyataan palsu dan akibatnya penyitaan manfaat yang diperoleh (sesuai dengan pasal 75 dan 76 Keputusan Presiden 445/2000) di bawah tanggung jawab mereka sendiri

NEGARA

lahir di _____ Prov. _____

menjadi penduduk di Munisipalitas _____

Jalan/Piazza _____ n. _____

bahwa status keluarga terdiri, selain saya, dari orang-orang berikut:

NAMA KELUARGA DAN NAMA DEPAN	TANGGAL LAHIR	TEMPAT KELAHIRAN	LAPORAN KEKERABATAN

menjadi warga negara Italia

menjadi warga negara _____

untuk menikmati hak-hak sipil dan politik

Menjadi: Gadis lajang dari negara bebas

menikah dengan _____

menjadi janda atau duda _____

Anda bercerai dari _____

Untuk menjadi masih hidup

bahwa anak saya bernama _____ lahir pada _____

pada _____ tahun _____ Prov.

_____ Negara _____

yang meninggal pada tanggal _____ (nama keluarga, nama depan dan hubungan keluarga)

_____ di _____

untuk didaftarkan dalam Daftar atau daftar berikut yang disimpan oleh administrasi publik

menjadi anggota asosiasi profesional _____

untuk memiliki qualification _____ berikut

Dikeluarkan oleh _____ sekolah/universitas

telah mengikuti ujian berikut _____
_____ di sekolah/universitas _____

Untuk memiliki kualifikasi profesional, spesialisasi, kualifikasi, pelatihan, penyegaran dan kualifikasi teknis berikut _____

bahwa pendapatan atau keadaan ekonomi mereka, termasuk untuk tujuan pemberian manfaat dalam bentuk apa pun yang disediakan untuk

Untuk undang-undang khusus, untuk tahun _____ adalah sebagai follows _____

telah memenuhi kewajiban kontribusi khusus untuk jumlah _____ yang dibayarkan

Kode pajak Anda _____

nomor PPN Anda atau data apa pun di arsip registri pajak _____

Anda saat ini menganggur , Anda sudah pensiun dengan kategori pensiun _____

menjadi mahasiswa di sekolah/universitas _____

menjadi perwakilan hukum dari orang perseorangan atau badan hukum, wali, kurator dan _____ serupa

untuk didaftarkan pada asosiasi atau formasi sosial dalam bentuk apa pun _____

untuk menemukan diri saya, untuk tujuan militer, dalam posisi _____

(menunggu panggilan, diberhentikan untuk akhir masa jabatan, direformasi, dibebaskan, ditangguhkan karena alasan di _____, karena telah menjabat sebagai pengganti sipil sebagai penentang hati nurani)

bahwa saya tidak mengetahui adanya proses pidana terhadap saya

bahwa dia telah menunggu proses pidana yang tertunda sebelum _____ untuk _____

tidak pernah dihukum karena pelanggaran pidana apa pun, bahkan sebagai akibat dari hukuman tawar-menawar pembelaan dan hukuman pidana

untuk melaporkan keyakinan berikut (juga menunjukkan yang belum final, dan untuk masing-masing apakah final atau tidak):

sedangkan dalam register status sipil Kotamadya _____ tampak bahwa _____

bahwa mereka tidak dalam keadaan likuidasi atau kebangkrutan dan bahwa mereka belum mengajukan pengaturan dengan kreditor

Yang bertanda tangan di bawah ini juga menyatakan untuk diberitahu, sesuai dengan Keputusan Legislatif no. 196/2003 (kode mengenai perlindungan data pribadi) dan Peraturan UE no. 679/2016 bahwa data pribadi yang dikumpulkan akan diproses, termasuk dengan alat TI, secara eksklusif dalam konteks prosedur pembuatan deklarasi ini.

Tanggal _____

Tanda tangan pelapor yang dapat dibaca _____

Deklarasi ini tidak memerlukan otentikasi tanda tangan dan menggantikan semua maksud dan tujuan sertifikasi normal yang diperlukan atau dimaksudkan untuk administrasi publik serta untuk manajer layanan publik dan individu swasta yang mengizinkannya. **Dalam kasus pernyataan palsu, pelapor juga akan dihukum karena pelanggaran pidana.**

Kutipan dari D.P.R. n. 445/2000: Art. 38 Prosedur untuk mengirim dan menandatangani aplikasi- [...] 3. Permohonan dan pernyataan sebagai pengganti surat pernyataan untuk disampaikan kepada badan administrasi publik atau kepada manajer atau operator pelayanan publik **harus ditandatangani oleh orang yang bersangkutan di hadapan karyawan yang bertanggung jawab atau ditandatangani dan diserahkan bersama dengan fotokopi dokumen identitas penandatangan** yang tidak bersertifikat. Salinan photostat dokumen harus ditempatkan dalam file. Salinan aplikasi yang ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan dan salinan dokumen identitas dapat dikirim secara elektronik; [...] **Pasal 47 Pernyataan sebagai pengganti surat pernyataan** - 1. Surat pernyataan mengenai status, sifat-sifat pribadi atau fakta-fakta yang diketahui langsung oleh yang bersangkutan harus diganti dengan pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 38. 2. Pernyataan yang dibuat untuk kepentingan pelapor sendiri juga dapat berhubungan dengan negara, kualitas pribadi dan fakta yang berkaitan dengan orang lain yang ia ketahui langsung. 3. Tanpa mengurangi pengecualian-pengecualian yang secara tegas diatur dalam undang-undang, dalam hubungan-hubungan dengan administrasi publik dan dengan pemegang konsesi pelayanan publik, semua negara, sifat-sifat pribadi dan fakta-fakta yang tidak secara tegas ditunjukkan dalam Pasal 46 harus dibuktikan oleh orang yang bersangkutan dengan cara pernyataan sebagai pengganti surat pernyataan. 4. Kecuali undang-undang secara tegas menetapkan bahwa laporan kepada Otoritas Polisi Yudisial merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mengaktifkan prosedur administratif untuk penerbitan dokumen identifikasi duplikat atau dalam hal apa pun yang menyatakan status pribadi dan kualitas orang yang bersangkutan, kehilangan dokumen itu sendiri harus dibuktikan oleh orang yang meminta duplikat melalui pernyataan pengganti. **Pasal 75 Penyitaan manfaat** - 1. Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 76, jika pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 mengungkapkan ketidakbenaran isi pernyataan, pelapor harus kehilangan manfaat apa pun yang dihasilkan dari tindakan yang dikeluarkan berdasarkan pernyataan yang tidak benar tersebut. 1-bis. Deklarasi palsu juga memerlukan pencabutan manfaat apa pun yang telah dibayarkan serta larangan akses ke kontribusi, pinjaman, dan fasilitas untuk jangka waktu 2 tahun sejak administrasi mengadopsi akta pernyataan. Namun, intervensi, termasuk yang ekonomi, yang mendukung anak di bawah umur dan untuk situasi keluarga dan sosial dengan kesulitan tertentu tetap teguh. **Pasal 76 Ketentuan Pidana** - 1. Setiap orang yang membuat pernyataan palsu, membentuk dokumen palsu atau memanfaatkannya dalam kasus-kasus yang diatur dalam undang-undang konsolidasi ini akan dihukum sesuai dengan KUHP dan undang-undang khusus tentang masalah ini. ((Hukuman yang biasanya diatur dalam KUHP ditingkatkan dari sepertiga menjadi setengah. 2. Produksi dokumen yang berisi data yang tidak lagi sesuai dengan kebenaran setara dengan penggunaan dokumen palsu. 3. Surat pernyataan yang dibuat sesuai dengan Pasal 46 dan 47 dan pernyataan yang dibuat atas nama orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(2) dianggap telah dibuat untuk pejabat publik.